



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 . 398 . XII. 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG/JASA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu adanya penetapan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	Ass. III	
4	Sekda	
5	Pj. Bupati	Untuk ditanda tangani

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 398.XII. 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG/JASA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu adanya penetapan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran

KABAN KEJANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 278).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 ((Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586);

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

3. Telaah Staf Nomor 900/BK-GORUT/660.A/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, Perihal Permohonan Penandatanganan Perbup dan SK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.

KEDUA : Nama, Spesimen tanda tangan dan paraf Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, terdapat pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- menyusun anggaran kas SKPD;
 - melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
- menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD
6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

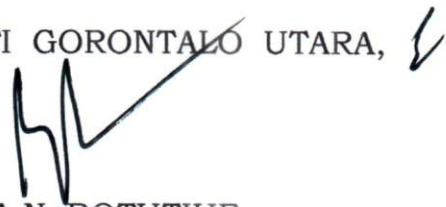
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

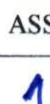
Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, ✓

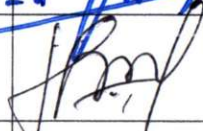
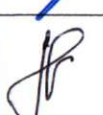

SILA N. BOTUTIHE

Tembusan Yth :

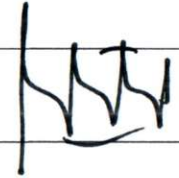
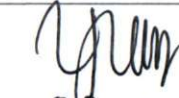
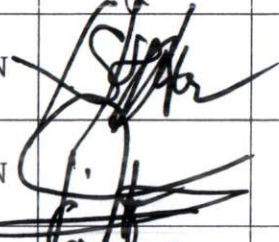
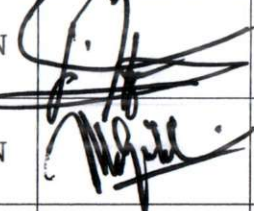
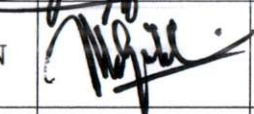
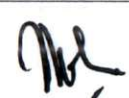
1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Yang bersangkutan.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

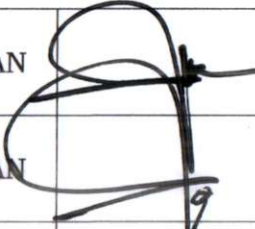
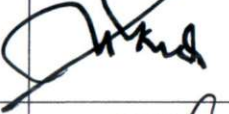
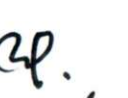
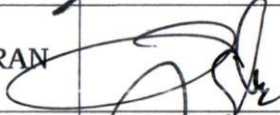
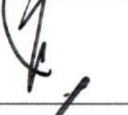
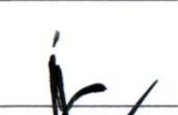
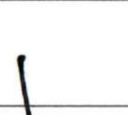
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 81.36.XI. 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG/JASA

NO	UNIT SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	SPESIMEN		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	SEKRETARIAT DAERAH	SULEMAN LAKORO, S.H., M.M Nip. 196812221994031006	PENGGUNA ANGGARAN			
2	SEKRETARIAT DPRD	Drs. FAHRUDIN LASULIKA, M.Ec.Dev Nip. 196611201993021004	PENGGUNA ANGGARAN			
3	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	HELMI POTUTU, SE.MAP Nip. 197309132000121003	PENGGUNA ANGGARAN			
4	BADAN KEUANGAN	MAYLAN TONGKODU, S.KOM., M.AP Nip. 197811242002122008	PENGGUNA ANGGARAN			
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DAHLAN WANTE, S.Pd.SD Nip. 196801291993031008	PENGGUNA ANGGARAN			
6	INSPEKTORAT	AZHAR ABDUL LATIF HASANA, S.Sos., M.Si Nip. 197004192005011008	PENGGUNA ANGGARAN			
7	DINAS PENDIDIKAN	IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd Nip. 196908091993031005	PENGGUNA ANGGARAN			

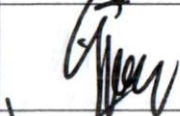
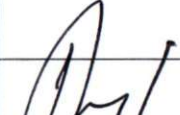
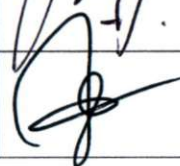
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

8	DINAS KESEHATAN	dr. SRI FENTY N. SAGAF, M.Kes Nip. 197109152006042022	PENGGUNA ANGGARAN			
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ir. HARIS Z. LATIF, ST.M.Si Nip. 196912101992031006	PENGGUNA ANGGARAN			
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Drs. JOST ADRIAN POMALINGO, M.Pd Nip. 196907051994031016	PENGGUNA ANGGARAN			
11	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	BADAR H PAKAYA, S.Pd MH Nip. 196506151994031010	PENGGUNA ANGGARAN			
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SUMITRO DATUNSOLANG, SE, M.AP Nip. 196702111988031011	PENGGUNA ANGGARAN			
13	DINAS SOSIAL	YOLANDA GIOLA, SH Nip. 198106172009012002	PENGGUNA ANGGARAN			
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SALHA A.K UNO, S.Pd., M.AP Nip. 196606271986032010	PENGGUNA ANGGARAN			
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	AJUBA J.S TALIB, S.Pd.MM Nip. 196611271988021001	PENGGUNA ANGGARAN			
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MOHAMAD TAMRIN SIRAJUDDIN, S.Pd, M.Si Nip. 197406192003121004	PENGGUNA ANGGARAN			
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dra. SARCE YOHAN KANDOU, M.PD Nip. 196907041998022004	PENGGUNA ANGGARAN			
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	TAMRIN MONOARFA, S.Pd, M.Pd Nip. 196808132000121004	PENGGUNA ANGGARAN			

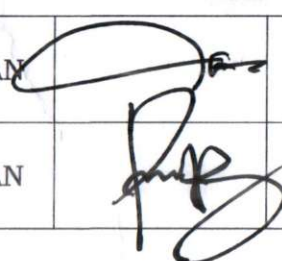
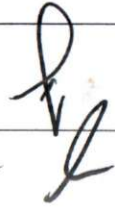
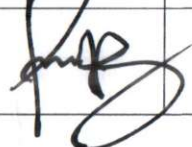
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OSNA HALUTI, S.KM Nip. 196712201989112001	PENGGUNA ANGGARAN			
20	DINAS PERHUBUNGAN	USMAN S. LAGARUSU, S.Pd Nip. 196701021991011001	PENGGUNA ANGGARAN			
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Drs. SEFRY BOBIHOE, M.Si Nip. 197109221994021001	PENGGUNA ANGGARAN			
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	EFENDI S. MOBILINGO, S.Sos Nip. 196912052000121003	PENGGUNA ANGGARAN			
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ABDUL WAHAB PAUDI, S.IP, M.Ap Nip. 196708221992031002	PENGGUNA ANGGARAN			
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ASRI ODE MUISI, SE, M.Si Nip. 196605151990031017	PENGGUNA ANGGARAN			
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dr. FAIZAL PIU, SE.,MM Nip. 197101091993031004	PENGGUNA ANGGARAN			
26	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Drs. ROBIN HERMAN DAUD, M.Si Nip. 196808261993021001	PENGGUNA ANGGARAN			
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DR. RUSLI G. AKASE, SE., M.Si Nip. 197612252009011007	PENGGUNA ANGGARAN			
28	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	ASRIN U. MENU, S.Pt., MM Nip. 196906282000031003	PENGGUNA ANGGARAN			
29	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	GRACE PARLIN D.MANGOSA, S.Pd., M.Pd Nip. 197901252005011006	PENGGUNA ANGGARAN			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

30	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FELMY AHMAD BIAHIMO AMU, SH., MH Nip. 196810012006042013	PENGGUNA ANGGARAN			
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Drs. ROI U. VAN SOLANG, M.Si Nip. 196702051998021004	PENGGUNA ANGGARAN			
32	KECAMATAN ANGGREK	JUSUF ABDULLAH HASAN, S.Ag Nip. 197007201994011002	PENGGUNA ANGGARAN			
33	KECAMATAN MONANO	ABDULLAH KADIR, S.Pd.,M.Pd Nip. 196901311987081001	PENGGUNA ANGGARAN			
34	KECAMATAN SUMALATA	ASRAN TAMRIN LASOMA, S.Pd 196708252005011008	PENGGUNA ANGGARAN			
35	KECAMATAN SUMALATA TIMUR	NURHAYATI WUNATY, S.Pd Nip. 197108201993022001	PENGGUNA ANGGARAN			
36	KECAMATAN KWANDANG	MUHTAR BASIR MAHMUD, S.Pd., MM Nip. 196811281994011001	PENGGUNA ANGGARAN			
37	KECAMATAN TOMILITO	RAFIQ M. RAHMOLA, SE Nip.198009202000121002	PENGGUNA ANGGARAN			
38	KECAMATAN GENTUMA RAYA	IBRAHIM K. TOMELO, SE., M.Si Nip.196805071997031009	PENGGUNA ANGGARAN			
39	KECAMATAN ATINGGOLA	ISMAIL POLAPA,SE Nip.197708302010011003	PENGGUNA ANGGARAN			
40	KECAMATAN BIAU	SUTAMIN K USMAN, S.Pd Nip.196904111993011006	PENGGUNA ANGGARAN			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

41	KECAMATAN TOLINGGULA	TONI ABAS,S.Kep Nip.197207071994031010	PENGGUNA ANGGARAN			
42	KECAMATAN PONELO KEPULAUAN	ROYIN BUHELI, S.Ip Nip. 198202042008021001	PENGGUNA ANGGARAN			

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 399 . XII . 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
BARANG/JASA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu adanya penetapan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	Ass. III	
4	Sekda	
5	Pj. Bupati	Untuk ditanda tangani

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR ~~Sk. 399~~ .XII. 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
BARANG/JASA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu adanya penetapan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);87
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang momor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 278).

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586);
 3. Telaah Staf Nomor 900/BK-GORUT/660.A/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, Perihal Permohonan Penandatanganan Perbup dan SK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa.
- KEDUA : Nama, Spesimen tanda tangan dan paraf Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, terdapat pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

2. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
3. PA melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA
4. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
5. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih melimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 31 Desember 2024

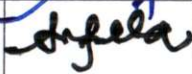
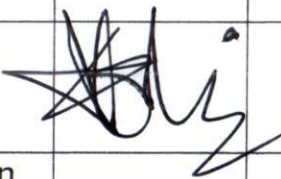
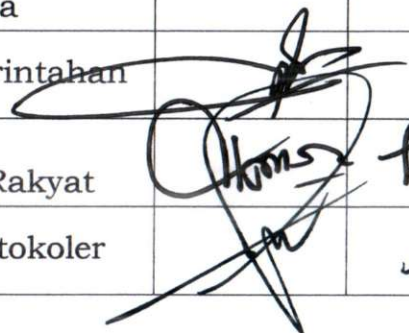
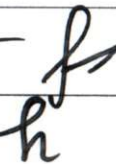
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 
SILA N. BOTUTIHE

Tembusan Yth :

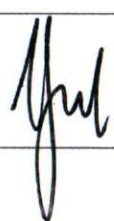
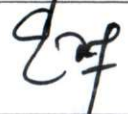
- 1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara.
- 4. Yang bersangkutan.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

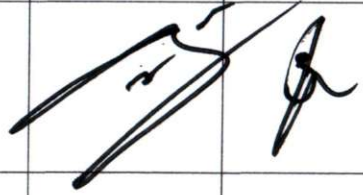
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 4.303.XII 2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG/JASA.

NO	UNIT SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	SPESIMEN		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	SEKRETARIAT DAERAH	FARIAL D. USU, S.AG., M.Si 197309032006042020	KPA Bagian Umum			
		SYAFRUDIN J. BORONG, SH., M.AP 198708092015032002	KPA Bagian Hukum			
		AMANDA F. SUNGE, S.ST.Pi., M.Si 198008262002121004	KPA Bag. Administrasi Pembangunan			
		Hi. IBRAHIM TOMELO, SE.,M.Si 196805071997031009	KPA Bagian Organisasi			
		ABDUL WAHID BARUADI, SE., M.Si 198309012010011008	KPA Bagian Perekonomian			
		Ir. ARDIANSYAH AKILI, ST 198403012010011002	KPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
		NAHARUDDIN, AP, S.Sos., M.Si 197303091993111001	KPA Bag. Pemerintahan			
		HARSONO RAHMAN, S.Pd. MM 197109161994031003	KPA Bagian Kesejahteraan Rakyat			
		JUSUF ABDULLAH HASAN, S.Ag 197007201994011002	KPA Bagian Protokoler			

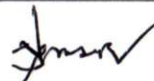
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

2	SEKRETARIAT DPRD	TAHIR RAUF, S.TP.,M.AP 196904201992031010	KPA Bagian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
		YAYU AYU RAHAYU M. DALI, S.Sos., M.H 198206132009012003	KPA Bagian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3	BADAN KEUANGAN	ABDUL HAMID R. TANAIYO, S.Pd 197401192008021001	KPA			
4	DINAS PENDIDIKAN	Ha. IRMAWATY ACHMAD, S.Pd, MM 1967060261985042001	KPA SEKRETARIAT			
		ISBAR DUKU, S.Pd, M.Si 197803212006041007	KPA BID. PEMBINAAN PAUD DAN PNF			
		ERNI R. YASIN, S.Pd 197103102003122008	KPA BID. PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR			
		SARCE UDIN NAKI, S.Pd., M.Pd 196706201993022002	KPA BID. PEMBINAAN KETENAGAAN			
5	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	ABD. HARIS HARUN DALI, ST.MM 197303091993111001	KPA Sekretariat, Operasional IPLT dan Bid. Penataan Ruang			
		Ir. KARTIN ABDULLAH, ST., M.T 197404212006042011	KPA Bidang Bina Marga			
		Ir. IRFAN RILMAN HARAHAH, ST., M.T 197704252010011004	KPA Bidang Cipta Karya			

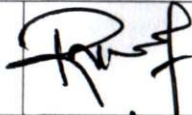
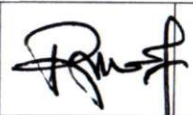
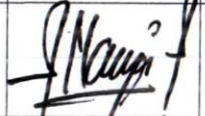
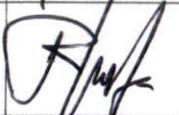
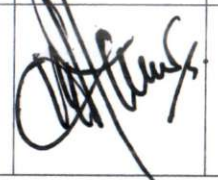
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

		Ir. SARIF PATAMANI, S.T 198305292010011006	KPA Bidang SDA			
5	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	OLFIN UNO, S.Sos.I 198401142009011004	KPA			
6	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	BEN R. NENTO, STP 197710312005011001	KPA Bidang PSP			
		NOVICAWATI SUJITO, ST, MM 198111152008022001	KPA Bid. TPH dan Bidang Perkebunan			
		FAHRI ABDULLAH, SE 198306212009011003	KPA Bid. Penyuluhan			
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RACHMAT SUJANA THORI, SE.M.Si 198001202008022001	KPA			
8	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SARFIN YUNUS, SE 197909172010011004	KPA			
9	RSUD. ZAINAL UMAR SIDIKI	dr. MOHAMAD ARDIANSYAH, M.Kes 197401182005011005	KPA RSUD ZUS			
10	DINAS KESEHATAN	MOH. DEKSON MOPILI, SKM 196907051991031007	KPA Bid. Sekretariat			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

FAHRIAH S. ALAMRI, S.Farm.Apt. 198411152011012001	KPA Bid. Pelayanan Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan			
SURYANTO SOLEMAN, S.ST 197103151993121003	KPA Bid. Pencegahan & Pengendalian Penyakit			
MAYA O. RAHMOLA, SKM., M.Si 197610032005012013	KPA Bid. Kesehatan Masyarakat			
MEIKE IBRAHIM, S.ST, M.Kes 197605282006042021	KPA UPTD Puskesmas Atinggola			
RAHMATIA MANASA, S,ST., M.Si 19801001 200012 2 003	KPA UPTD Puskesmas Gentuma			
YULIANA MISAR, ST.Keb, M.Kes 19740716 1993012002	KPA UPTD Puskesmas Dambalo			
WISNA T. YUSUF, A.Md.Kep 19830708 200901 2 001	KPA UPTD Puskesmas Ponelo			
dr. ALINDA SAHRUDIN 19810228 201412 2 001	KPA UPTD Puskesmas Kwandang			
RASTRI N.P WEMBEN, SKM,M.Si 19810508 200901 2 003	KPA UPTD Puskesmas Molingkapoto			
LATIFAH,S.FARM, Apt 19781014 201101 2001	KPA UPTD Puskesmas Ilangata			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

		RIRIYANTI A.MBUINGA, S.ST 19760510 200312 2 006	KPA UPTD Puskesmas Anggrek			
		dr. NORMA CHRISTINA SIMBAYAN 19771118 201412 2001	KPA UPTD Puskesmas Monano			
		ARMAN K SUNGE, Amd., Kep 197402071994031002	KPA UPTD Puskesmas Sumalata			
		SRI NANGSI LADICI, S.Si.Apt,M.Si 198707162015032001	KPA UPTD Puskesmas Dulukapa			
		REYNOLDI TOANA, S. Kep 19850418 2008021001	KPA UPTD Puskesmas Buloila			
		DAKHRI ZAKARIA, SKM 197307211994031005	KPA UPTD Puskesmas Biau			
		IFRAN ABUBAKAR, SKM 19670105 200801 1 015	KPA UPTD Puskesmas Tolinggula			
		NANANG SUGIARTO, S. Farm, Apt 19830513 201001 1 005	KPA UPTD Puskesmas Limbato			
		drg. KARTINI F. BILONDATU, SE 197904212014032001	KPA RS. Tolinggula Melayani			
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	MASITA YASIN, S.Kep.Ners 196705281988032008	KPA DINAS PP & KB			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

12	DINAS PETERNAKAN DAN DAN KESEHATAN HEWAN	MOH. FADLY, S.Pt 197801282008021001	KPA BID. KESWAN. KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN			
		MASRI MANE ADJULA, S.AP 197103161993031009	KPA BID. PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK			
		FELMI PATILIMA, SE 197308131994022002	KPA BID. PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN			

Pj, BUPATI GORONTALO UTARA, 


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR *Sk. 400 .XII.* 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENGELUARAN PEMBANTU
SERTA BENDAHARA PENERIMAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 ayat

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	Ass. III	
4	Sekda	
5	Pj. Bupati	Untuk ditanda tangani

(1) huruf e dan f, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR *St. 400 . XII .* 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENGELUARAN PEMBANTU
SERTA BENDAHARA PENERIMAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 ayat (1) huruf e dan f, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 278).

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 586);

3. Telaah Staf Nomor 900/BK-GORUT/660.A/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, Perihal Permohonan Penandatanganan Perbup dan SK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDUA : Nama dan Spesimen tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Bendahara Pengeluaran :
1. memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD
3. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 4. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

II. Bendahara pengeluaran pembantu

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

2. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

3. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA

4. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

III. Bendahara Penerimaan :

1. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
2. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu :
 - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

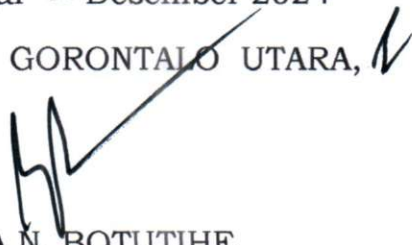
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA

- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dan menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan insentif dalam bentuk Tunjangan Kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

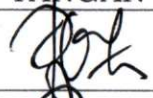
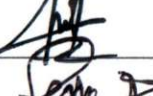
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 
SILA N. BOTUTIHE

- Tembusan Yth :
- 1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 4. Perangkat Daerah Terkait.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

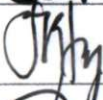
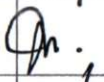
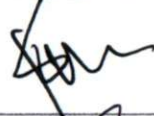
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 84. 400. XI. 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SERTA BENDAHARA PENERIMAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

NO	UNIT OPD	NAMA / NIP	JABATAN	SPESIMEN		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	SEKRETARIAT DAERAH	KARTIN MANAN 198011272009012003	Bendahara Pengeluaran			
		FEBRIYANTI A. USMAN, SE 198602152020122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	JEFRI REYKI MAKSUM 198901132020121001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	HARMISAH S.Pd 198305142009012006	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN HUKUM	AFRIANDI VAN GOBEL 199510102015031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA	FAJRUNNISA R. RAUF, SE 199511252022022005	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RONAL K OTOLUWA, SE 198711292022021003	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAHLAWANTI PAKAYA, A.Md 198611102020122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN ORGANISASI & RB	FITRI KARNILAH ABDUL HAMID, SE 199308142022022003	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	BAGIAN PROTOKOLER & HUMAS	AMALIA NUR WULANDARI, S.Tr.Ssos 199501252020122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			

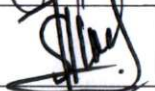
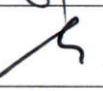
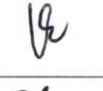
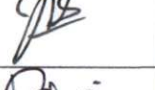
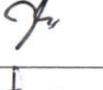
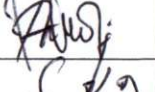
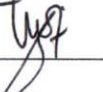
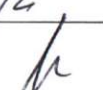
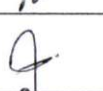
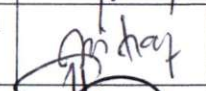
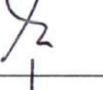
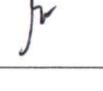
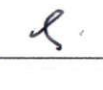
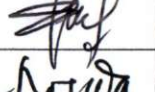
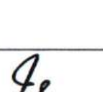
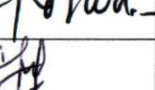
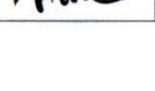
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

2	SEKRETARIAT DPRD	NUR MUZAETA IDRIS, SE 199708142022022003	Bendahara Pengeluaran	Murafa	Am	
		SUKMA WINDA GOBEL 198612032010012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Hanjo	h	
		ERLIN D. POLULI,SE 198909212022022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Surf.	ja	
3	INSPEKTORAT DAERAH	GUSLI PURNAMA HADJU, A.Md 198808272014031002	Bendahara Pengeluaran	Cyky	Cy	
		MOHAMAD ZULKIFLI,S.Pi 19911201202001221001	Bendahara Penerimaan	Stun	so	
4	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	RISNAWATY SILI 198303152011012003	Bendahara Pengeluaran	RhmB	H	
		ELCON MAHMUD GUI 198010152007011007	Bendahara Pengeluaran Pembantu	CaShap	e	
5	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	RACHMATIA HUMONGGIO, S.Ak 199408032020122003	Bendahara Pengeluaran	Thy	Rh	
		DESRIYANTI YUNUS,SE 199412122019032014	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Phy	d	
6	BADAN KEUANGAN	RIRIN S. AKUBA, S.Akun 199512162022022001	Bendahara Pengeluaran	Ry	R	
		MOH. ARDIANSYAH LAHAY, S.Kom 198909302019031011	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Arman	d	
		YUSNI S. MOHUNE, S.M 198705162011012002	Bendahara Penerimaan	Jhuny.	f.	
7	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	WARMAN MOHAMAD AYUBA, S.IP 198207312006041013	Bendahara Pengeluaran	Wye	yp	
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FARA R. ASTUTY KELILAW,S.Psi 199603112022022004	Bendahara Pengeluaran	Foz.	f.	
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	RAHMI TAHIR, S.Tr.Sos 199606012020122001	Bendahara Pengeluaran	2nd	rh	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	MAIMUN HELINGO, S.Kom 198302132010012006	Bendahara Pengeluaran	Hh	f	

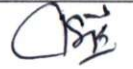
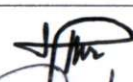
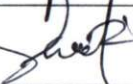
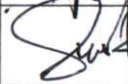
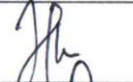
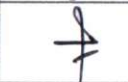
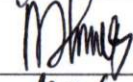
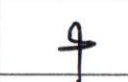
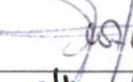
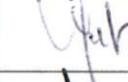
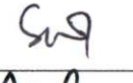
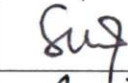
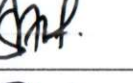
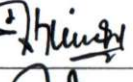
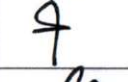
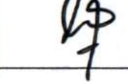
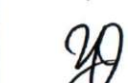
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
f	h	u	v

		MUHAMMAD SURYADI BAYU KUSWARA, S.Tr.Sos 199604092022021001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	ISMAN I. PAKAYA, SP 199609152022021003	Bendahara Pengeluaran			
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FEMY REDY TANAIYO 197704292014082001	Bendahara Pengeluaran			
		MOCHAMAD REZKY DAENG SITA,SE 199608042020121001	Bendahara Penerimaan			
13	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	GUSTI KURNIAWAN HADJU, A.Md 198208302010011005	Bendahara Pengeluaran			
		RENOLD DECKY MANUHUTU, A.Md 198812032014031003	Bendahara Penerimaan			
		Ir. SANTI YANTUNA, S.T 198210112011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		RIDWAN AKUBA, A.Md 198510142010011001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		LIONY DWI PUTRI TAKAREDAS, S.T 199004132019032007	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		MOH. HENDRATMO PEMBENGO, A.Md 198808292019031006	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	ZULKIFLI MONOARFA, S.Sos 199601272020121001	Bendahara Pengeluaran			
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	NURHAYATI USMAN, S.Pi 199109142022022001	Bendahara Pengeluaran			
		DEYSI A. MAKSUM, A.Md 198412022010012010	Bendahara Penerimaan			
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	FIRMAN MAHMUD, S.Akun 198907022022021001	Bendahara Pengeluaran			
		REZAL SAPUTRA AYUBA, S.T NIP. 19971024 202202 1 002	Bendahara Penerimaan			
17	DINAS SOSIAL	MOHAMAD AZRAR AZIS, S.Sos 199104102019031011	Bendahara Pengeluaran			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

18	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	SALLY WIRANTI DAMA, SP 199210272020122002	Bendahara Pengeluaran			
		MARNI S. ADAM, SP 199006062020122002	Bendahara Penerimaan			
		VENTI S. NOER, SP 197303272014082001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		MOHAMAD ISNAN SUWARDI, STP 199501062020121003	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		PRATIWI ISMAIL, SP 198602282011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	FAISAL SENDUK 197903262007011007	Bendahara Pengeluaran			
		APRIYANTO SALAMA, SP 199104212020121001	Bendahara Penerimaan			
		SRI INDRIYANI PANELO, S.KOM 199509172023212030	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		FITRIANA DIMYATI, STP 198108022023212008	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		MUHAMAD FAJRIN UTINA, S.Pt 199412242023211015	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		OLAN MADINA, S.Psi 199004242023212053	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
20	DINAS PERHUBUNGAN	ADE PUSPITA DEWI, SE 199602152020122001	Bendahara Pengeluaran			
		SURATNI A. DALI, A.Md 197706122011012001	Bendahara Penerimaan			
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ROSIDA TIANG, A.Md. Par 197908072014032001	Bendahara Pengeluaran			
		INDRAWATI ABUHASAN, S.Sos 199604262022022005	Bendahara Penerimaan			
22	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	NELAN SALEH, SE 198803152020122001	Bendahara Pengeluaran			

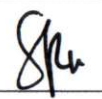
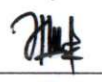
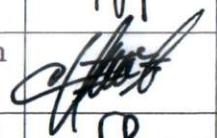
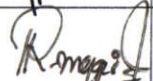
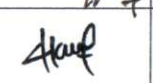
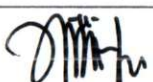
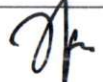
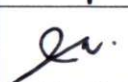
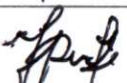
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

23	DINAS PENDIDIKAN	SUHARTININGSIH KATILI, S.AP 197910042007012099	Bendahara Pengeluaran			
		ANDRIANY LABOLO, S.Pd 198304072010012007	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SYAFRIN U. BIKI, S.Pd 198211272009011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		YURNI O. IBRAHIM, SE 197710142014082002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		ZULAIHA S. BILONDATU, S.Pd 198502162010012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
24	DINAS KESEHATAN	MEILAN ARSYAD, SE 199605012020122001	Bendahara Pengeluaran			
		LISNA AHMAD, A.Md 198407142010012005	Bendahara Penerimaan			
		IRAWATI MUNTALA, S.K.M 198407202010012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		WULANDYA HENGA, S.K.M 198807192019032008	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SRI WAHYU S. LUMULA, A.Md.Keb 199209062014032002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SOEMİYATI MACHMUD, SE 198011062011012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
25	PUSKESMAS KWANDANG	SUHARTIN, S.Kep., Ns 199112142014032003	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		LAILA ARBIE, A.Md.Kep 198611012010012002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
26	PUSKESMAS MOLINGKAPOTO	LILIS DJAHARI, S.Fram.Apt 199002022019032000	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SURYANI HUNOWU, A.Md.Kep 199107042017052004	Bendahara Penerimaan Pembantu			

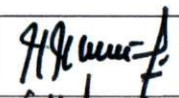
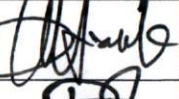
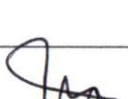
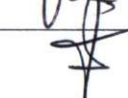
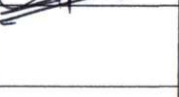
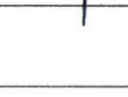
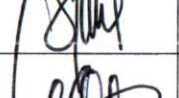
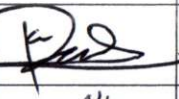
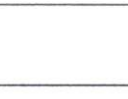
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

27	PUSKESMAS GENTUMA	FADILLAH RAMADHANI, S. Farm., Apt 199412012022022006	Bendahara Pengeluaran Pembantu	F22	22	
		REFLIA TANGAHU, AMKL 198812232011012001	Bendahara Penerimaan Pembantu	R	f	
28	PUSKESMAS ANGGREK	GERLIN MEILANY LOUPATTY, A.Md.Kep 199308102019032015	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		FAUZIAH LAGONA, A.Md., Keb 198906012017052002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
29	PUSKESMAS MONANO	NUGRAH YASNI ANGGRAINI TOLOHULA, 199308032022022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		HARDIANTI, AMKL 198507012014032001	Bendahara Penerimaan Pembantu			
30	PUSKESMAS DULUKAPA	SRI YULANTRI DEWI IMRAN, A.Md.Keb 199005102017052005	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		CHITRA TOBUHU, A.Md.Kep 199203012015032002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
31	PUSKESMAS SUMALATA	ROSTANTI A. BADEMBE, A.Md.Keb 199007222017052001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SELVIANA ISKANDAR. A.Md.Keb 198910192017052005	Bendahara Penerimaan Pembantu			
32	PUSKESMAS BIAU	FRIHATININGSIH, S.Farm 198802252010012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		NASRA, A.Md.Keb 198310082017052001	Bendahara Penerimaan Pembantu			
33	PUSKESMAS TOLINGGULA	FEBRIYANTI, S.Farm 198802012014032002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		ANSAR, A.Md.Kep 198810012014031002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
34	PUSKESMAS ATINGGOLA	WIDYAWATI HATIBAE, AMKL 199011022019032016	Bendahara Pengeluaran Pembantu			

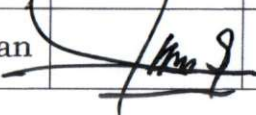
KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA

		SRI SUSANTI GIOLA, AMKL 198208282006042027	Bendahara Penerimaan Pembantu			
35	PUSKESMAS PONELO	FATRIANA S. MAGASINGAN, A.Md.Keb 199103212017052003	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		ADHA EVELYN HUSAIN, S.Farm., APT 199704182022022001	Bendahara Penerimaan Pembantu			
36	PUSKESMAS BULOILA	MUNAFRI A. TAHIR, S.Farm., Apt 199408282022021002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		WERRU ANDI SUPRIANU, S.Kep.Ns 198710212011011002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
37	PUSKESMAS ILANGATA	FATRA S.K NADI, AMG 198208142014032002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		RIA INGGRINAH DUNGGIO, Amd, Kep 198607142009012001	Bendahara Penerimaan Pembantu			
38	PUSKESMAS DAMBALO	LENI ERNAWATI, A.Md.Kep 198909132011012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		ANITA, A.Md.Keb 199002082017052002	Bendahara Penerimaan Pembantu			
39	PUSKESMAS LIMBATO	RIZCQA ANDINI M. DJ., S.Farm., Apt 199607242022022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		SAMSUL KADIR, A.Md.Kep 199605042019031004	Bendahara Penerimaan Pembantu			
40	RS TOLINGGULA MELAYANI	INRI FLORA, S.Kep.Ns 199005062019032014	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		IRMAWATI, A.Md.Keb 198911022017052009	Bendahara Penerimaan Pembantu			
41	RSUD ZAINAL UMAR SIDIKI	ARMINA TOLULU, SKM 198107292011012001	Bendahara Pengeluaran			
		NURHAYATI ISMAIL, S.Si 198702272011012001	Bendahara Penerimaan			
42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ANNAS MUKHTAR, SE 199212282022021002	Bendahara Pengeluaran			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	HERLINA YUSUF, S.Pd 197409262006042013	Bendahara Pengeluaran			
44	DINAS SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN KEBAKARAN	ZULFIAH BUHUNGO, A.Md 198607292009012003	Bendahara Pengeluaran			
45	DINAS PERUM RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	MUHAMMAD REZHA B. BOKINGS, ST 199206252022021001	Bendahara Pengeluaran			
		SILVERA MAMAHIT, ST 199004162019032015	Bendahara Penerimaan			
46	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	MARIANI HADJI ALI, SM 198810302022022002	Bendahara Pengeluaran			
47	DINAS PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	DEWI YULIANTIKA, A.Md.Keb 199206172015032001	Bendahara Pengeluaran			
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (STATISTIK DAN PERSANDIAN)	RAMLI BIKI, A.Md 198807132019031007	Bendahara Pengeluaran			
49	KANTOR CAMAT KWANDANG	ASRIN JAN MAINO, SE 19690142009062001	Bendahara Pengeluaran			
50	KANTOR CAMAT ANGGREK	CYNTIA APRIYANI MAHMUD, S.Tr.Sos 199804092022022003	Bendahara Pengeluaran			
51	KANTOR CAMAT ATINGGOLA	MUNAWIR DJ. DESEI, SE.MM 198510162019031005	Bendahara Pengeluaran			
52	KANTOR CAMAT SUMALATA	RITON K. TIMO, SP 197505102014081001	Bendahara Pengeluaran			
53	KANTOR CAMAT TOLINGGULA	DANIEL KALIBATO, A.Ma.Pd.SD 198412042010011003	Bendahara Pengeluaran			
54	KANTOR CAMAT GENTUMA	RAHMIYATI PAKAYA, SE 199507302022022002	Bendahara Pengeluaran			
55	KANTOR CAMAT BIAU	ETMON ULAMA 198302062014081002	Bendahara Pengeluaran			
56	KANTOR CAMAT SUMALATA TIMUR	NOVIA NORMA YUNITA, S.Tr. Sos 199711252022022001	Bendahara Pengeluaran			
57	KANTOR CAMAT MONANO	ZULKIFLI ABUBAKAR, SE 199607262022021003	Bendahara Pengeluaran			

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			

58	KANTOR CAMAT TOMILITO	ABDUL RAHMAN RAJAWALI, S.E 19980110 202202 1 001	Bendahara Pengeluaran			
59	KANTOR CAMAT PONELO KEPULAUAN	SOFYAN KAU, SE 199111142022021003	Bendahara Pengeluaran			

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 


SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA
			